

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pengolahan dan analisis data mengenai pola kaderisasi partai politik (studi kasus di DPD PDIP Jawa Barat). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem rekrutmen yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam mencari anggota baru adalah dengan menggunakan sistem kegunaan (*merit system*). Sistem kegunaan (*merit system*) adalah sistem perekrutan yang didasarkan pada standar-standar tertentu yang disyaratkan. Sistem ini lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan objektif (termasuk layak/tidak layak). Implementasi dari *merit system* yang dijalankan di PDI Perjuangan adalah dengan memperhatikan usulan dari struktur partai mulai dari yang paling bawah (*recruitment by bottom up demand*). Pendekatan usulan dari bawah yang dilakukan PDI Perjuangan ini bisa kita lihat dari proses rekrutmen yang dilakukan, dimana rekrutmen untuk mencari anggota baru kini menjadi kewenangan PAC di setiap tingkatan. DPP tidak lagi dominan dalam menentukan siapa saja yang akan direkrut untuk menjadi anggota. Proses rekrutmen sendiri dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
2. Pola kaderisasi yang dijalankan di PDI Perjuangan sendiri adalah *System Stelsel Aktif*, yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang

ingin menjadi kader harus aktif. Implementasi sistem kaderisasi di PDI Perjuangan sendiri adalah melalui empat proses yaitu: Penarikan (rekrutmen), Proses seleksi, Pendidikan politik, dan Pengembangan.

3. Distribusi kader di PDI Perjuangan, dilakukan dimana kader yang telah melewati proses kaderisasi sudah ditentukan posisi-posisi mana saja yang mereka isi seperti yang sudah ditarget oleh partai, hal ini disebut dengan pendayagunaan kader. Pendayagunaan kader ini dimaksudkan untuk memanfaatkan kader bagi kepentingan perjuangan partai, baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal partai dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Pendistribusian atau pendayagunaan kader ini dirinci sebagai berikut:

- a. untuk kader pratama dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan publik tingkat paling rendah seperti di tingkat Desa/Kabupaten dan Kabupaten/Kota
- b. untuk kader madya dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan publik tingkat Provinsi; dan
- c. untuk kader utama dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan publik tingkat nasional, seperti anggota DPR maupun MPR

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk PDI Perjuangan

a. Mengenai Rekrutmen

Untuk lebih diarahkan kelompok-kelompok (kelompok sasaran) mana saja yang akan direkrut oleh partai guna memperluas jaringan partai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tidak jelasnya kelompok sasaran yang akan direkrut membuat para senior/elite partai lebih memilih merekrut orang-orang yang memiliki kedekatan atau hubungan darah dengan mereka.

b. Mengenai Kaderisasi

Secara konseptual, kaderisasi di PDI Perjuangan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pola kaderisasinya yang sudah jelas, materi-materi kaderisasi yang sudah tersusun rapih dalam bentuk kurikulum kaderisasi, dan metode kaderisasi yang bervariasi dalam mengembangkan potensi para kadernya. Hal yang perlu dilakukan PDI Perjuangan saat ini adalah lebih meningkatkan lagi proses kaderisasinya agar menjadi lebih baik.

Walaupun secara konseptual kaderisasi di PDI Perjuangan sudah berjalan dengan baik, namun pada prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan yang diantaranya menyakut jadwal kaderisasi. Kaderisasi di PDI Perjuangan tidak dilakukan dengan rutin. Hal inilah yang membuat kaderisasi di PDI Perjuangan kurang efektif. Untuk itu perlu dibuat jadwal yang rutin yang mengatur tentang pelaksanaan kaderisasi.

c. Mengenai Distribusi Kader

Perlu dibuatnya syarat-syarat khusus bagi kader-kader yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan publik. Syarat itu dapat berupa *track record* selama beraktifitas di dalam maupun di luar partai, loyalitas terhadap partai, dan kualitas kader yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kader mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan-jabatan publik, tidak hanya akan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

2. Saran Untuk Partai Politik Pada Umumnya

a. Mengenai Rekrutmen

Membuat pola rekrutmen yang sistematis. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya dengan: 1) Menentukan kelompok-kelompok (kelompok sasaran) yang akan direkrut 2) Menentukan kriteria-kriteria khusus (di luar kriteria-kriteria yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) bagi orang-orang yang akan direkrut menjadi anggota 3) Menentukan standar pola rekrutmen yang khusus bagi anggota biasa, pengurus partai, dan calon legislatif.

b. Mengenai Kaderisasi

1) Melakukan aktifitas pelatihan secara rutin 2) Memberikan kesempatan kepada para anggota untuk berpartisipasi dengan aktif dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 3) Membuat kurikulum (materi-materi) kaderisasi yang jelas

c. Mengenai Distribusi/Pendayagunaan Kader

- 1) Membuat sistem *database* anggota. Banyaknya partai yang tidak memiliki data mengenai jumlah anggotanya serta data lain (kontak, pendidikan, keterampilan) mengenai para anggotanya membuat partai tidak dapat memanfaatkan anggotanya secara efisien
- 2) Membuat persyaratan khusus untuk kader-kader yang akan mengisi jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, setiap kader mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

3. Saran Untuk Masyarakat

Banyak kalangan yang menilai pola kaderisasi partai politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Tapi perlu diingat tidak semua partai politik memiliki pola kaderisasi yang tidak jelas. Maka bagi seluruh lapisan masyarakat, sebelum kita menilai baik buruknya suatu partai terlebih dahulu kita harus kenali dulu partai tersebut. Lihat dari visi dan misinya, pahami dengan jelas *platform*-nya, perhatikan kejelasan kader dan kepengurusannya dll. Setelah kita mengetahui betul akan semua hal itu, kita baru bisa menilai partai tersebut baik atau tidak.